

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, A'an & Poernomo, Freddy. (2019). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hayati, Tri. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim Undang-Undang No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Redi, Ahmad. (2014). *Hukum Pertambangan: Pertautan Kepentingan Negara, Rakyat, dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, H. R. (2022). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Ridwan, Juniarso & Sudrajat, Achmad Sodik. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Salim, H. S. (2012). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU -XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU -XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-XIX/2021.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 954/Pid.Sus-LH/2025/PN Bdg.

SUMBER LAINNYA

- Darongke, Friskilia Junisa Bastiana, dkk. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10 (3), 1-13. Diakses 10 Januari 2026.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/41456/36855>
- Dewa, M. J., dkk. (2023). Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Halu Oleo Legal Research*, 5 (1), 62–75. Diakses 16 Januari 2026.
<https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.220>
- Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suswinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3 (11), 871–891. Diakses 15 Januari 2026.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.336>
- Herman, H., dkk. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4 (2), 261–275. Diakses 12 Januari 2026.
<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/47>
- Hidayat, R. (2020). Implementasi Instrumen Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8 (1), 1-18. Diakses 14 Januari 2026.
<http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3208>
- Huda, N., & Wibowo, A. (2024). Penerapan *Green Constitution* di Indonesia dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *Jurnal Terang: Hukum dan Keadilan*, 1 (3), 179-200. Diakses 16 Januari 2026. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.415>
- Pudyatmoko, Y. S. (2025). Efektivitas Ancaman Pidana Denda Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Dalam Amandemen Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55 (2). Diakses 19 Januari 2026. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1824>
- Rachman, A. A., Amin, M. J., & Taufik, M. (2021). Pengawasan Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9 (4), 156-166. Diakses 17 Januari 2026. <https://ejournals2.unmul.ac.id/index.php/jip/article/view/909>

- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (3), 337-353. Diakses 15 Januari 2026. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- Roeroe, S. D. L., Tinangon, E. N., & Mumu, R. (2025). Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara. *Lex Crimen*, 13 (1). Diakses 18 Januari 2026. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64937>
- Syaripudin, U. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Meningkatkan Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Dinas Tata Ruang Permukiman Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Syntax Imperatif*, 1 (1), 1–12. Diakses 20 Januari 2026. <http://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/25>
- Taruna, B. B., & Putri, R. E. G. D. (2025). Implementasi Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Melakukan Reklamasi Pascatambang di Desa Langkapjaya. *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 3 (2), 106-117. Diakses 15 Januari 2026. <https://doi.org/10.61590/srp.v3i2.193>
- Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Menuju Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia. *IBLAM Law Review*, 4 (3), 11–22. Diakses 18 Januari 2026. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>
- Wawancara Mendalam (In-Depth Interview). (2026). Hasil Wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas ESDM Wilayah VI, Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, Perum Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa Linggajati, serta Tokoh Masyarakat dan Adat. Tasikmalaya.